



Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Informasi terhadap Partisipasi Politik pada Pilkada COVID-19: Analisis SEM dan Model Skills Democracy

Afif Syarifudin Yahya

Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Korespondensi penulis: afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id

Abstract. *This study investigates the influence of Apparatus Competency and Information Systems on Community Political Participation in the Local Government Head Election during the COVID-19 pandemic era in Karawang Regency. The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to democratic processes, particularly in maintaining voter participation while ensuring public health safety. Employing a mixed-methods approach combining quantitative and qualitative data with Structural Equation Modeling (SEM) analysis, this research analyzed data from 263 respondents across various election administrative units. The results indicate that: (1) Apparatus Competency does not have a significant positive effect on Community Political Participation ($T\text{-value} = 1.01 < 1.96$); (2) Information Systems have a significant positive effect on Community Political Participation ($T\text{-value} = 2.78 > 1.96$; path coefficient = 0.67). The combined contribution of both variables explains 76% of the variance in political participation. From these findings, the study proposes the Skills Democracy Model, emphasizing that digital information skills and organizational experience are critical determinants of democratic participation quality during pandemic conditions. These findings have significant implications for election governance reform and e-democracy development in Indonesia.*

Keywords: *Apparatus Competency; Community Political Participation; Information Systems; Local Government Head Election; Skills Democracy Model*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Informasi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan besar bagi proses demokrasi, khususnya dalam mempertahankan partisipasi pemilih dengan tetap menjaga keselamatan kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini menganalisis data dari 263 responden dari berbagai unit tingkatan pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat ($T\text{-value} = 1,01 < 1,96$); (2) Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat ($T\text{-value} = 2,78 > 1,96$; koefisien jalur = 0,67). Kontribusi kedua variabel secara simultan menjelaskan 76% varians partisipasi politik. Dari temuan ini, penelitian mengusulkan Skills Democracy Model, yang menekankan bahwa keterampilan informasi digital dan pengalaman organisasi merupakan determinan kritis kualitas partisipasi demokrasi pada kondisi pandemi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi reformasi tata kelola pemilu dan pengembangan e-demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Kompetensi Aparatur; Partisipasi Politik Masyarakat; Pilkada; Sistem Informasi; Skills Democracy Model*

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen fundamental untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, karena melalui mekanisme ini masyarakat dapat secara langsung memilih kandidat yang dinilai mampu memimpin pemerintahan daerah ke depan. Dalam konteks demokrasi modern, pemilihan umum merupakan keniscayaan bagi setiap negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis (Dahl, 2020; Norris, 2004). Hal ini sejalan dengan prinsip Abraham Lincoln yang

menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah *government of the people, by the people, and for the people* (Simamora, 2011; Lijphart, 1997). Demokrasi substansial tidak hanya menyangkut pelaksanaan prosedur pemilihan, tetapi berkaitan erat dengan kualitas partisipasi politik masyarakat yang mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya (Pateman, 1970; Huntington & Nelson, 1976).

Di Indonesia, pemilihan umum secara langsung dan demokratis telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sementara itu, Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Landasan konstitusional ini menjadikan Pilkada sebagai mandat yang wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan demokrasi lokal yang bermartabat (Prasetyoningsih, 2017; Junaidi, 2009). Dalam perspektif demokrasi lokal, partisipasi masyarakat dalam Pilkada berkontribusi pada pembentukan *civic community* dan solidaritas sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah (Putnam, 2000; Verba et al., 1995).

Partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan indikator penting kesehatan demokrasi suatu bangsa. Franklin (2004) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) menjadi cerminan seberapa jauh warga negara merasa terlibat dan dipercaya dalam sistem politik yang ada. Ketika tingkat partisipasi pemilih rendah, hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam sistem demokrasi, baik berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, maupun faktor-faktor sosial-ekonomi yang menghambat keterlibatan warga (Blais, 2006; Norris, 2011). Secara empiris, Milbrath & Goel (1977) mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi politik, mulai dari stimulus politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, hingga kondisi lingkungan politik yang berlaku.

Tahun 2020 menjadi tahun yang bersejarah bagi pelaksanaan demokrasi elektoral Indonesia, mengingat Pilkada Serentak 2020 harus dilaksanakan di tengah pandemi virus COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang mengancam kesehatan jutaan warga. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang tetap melaksanakan pemilihan umum di tengah gelombang pandemi global tersebut. Sebanyak 270 daerah, termasuk Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat, melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Fenomena ini menarik perhatian dunia internasional, mengingat sejumlah negara yang melaksanakan pemilu selama pandemi mengalami kenaikan angka infeksi COVID-19 pasca pelaksanaan pemilihan, seperti yang terjadi di Belarus, Polandia, Serbia, dan Singapura (James & Alihodzic,

2020; Grömping, 2022). Di sisi lain, Korea Selatan berhasil menjadi contoh sukses penyelenggaraan pemilu di masa pandemi dengan peningkatan partisipasi pemilih sebesar 8,1% berkat integrasi sistem informasi yang handal dan protokol kesehatan yang ketat (Goodman, 2020; Merivaki & Smith, 2020).

Kabupaten Karawang, yang merupakan salah satu daerah yang paling lama berstatus zona merah COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan ganda dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin dari 173.660 jiwa pada tahun 2019 menjadi 195.410 jiwa pada tahun 2020, mencerminkan tekanan ekonomi yang berat akibat pandemi. Secara bersamaan, data kesehatan mencatat hingga 19 Maret 2021 terdapat 15.895 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dengan 504 kematian. Kondisi ini secara langsung memengaruhi dinamika sosial-politik masyarakat, termasuk keberanian dan ketersediaan warga untuk mendatangi tempat pemungutan suara (Goodman & Stokes, 2020; Beaulieu, 2014).

Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang mencatat bahwa dari 1.643.490 daftar pemilih tetap dengan target partisipasi 77,5%, realisasi tingkat partisipasi hanya mencapai 70,02% atau sebanyak 1.150.772 pemilih. Artinya, terdapat defisit partisipasi sebesar 7,48% atau sekitar 122.933 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena golput (golongan putih) atau tidak memilih ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai perspektif, khususnya dari sisi kompetensi aparatur penyelenggara dan kualitas sistem informasi yang mendukung proses demokrasi (Norris et al., 2020; Cahyaningsih et al., 2019).

Permasalahan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada merupakan fenomena yang telah banyak diteliti dari perspektif berbagai faktor. Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat dan lembaga penyelenggara pemilu menjadi salah satu penyebab utama golput (Norris, 2002; Calenda & Meijer, 2009). Ketidakpercayaan ini sering kali bersumber dari persepsi masyarakat tentang kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk profesionalisme dan kompetensi aparatur penyelenggara serta transparansi sistem informasi yang digunakan. Yeo (2021) dalam kajian komparatifnya tentang pemilu di Asia Tenggara selama COVID-19 menegaskan bahwa negara-negara yang memiliki aparatur pemilu yang kompeten dan infrastruktur informasi yang kuat cenderung mempertahankan tingkat partisipasi yang lebih baik bahkan di tengah tekanan pandemi.

Kompetensi aparatur penyelenggara pemilu memegang peranan strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi politik. Spencer & Spencer (1993) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang

memungkinkannya untuk memberikan kinerja superior dalam pekerjaan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, kompetensi aparatur mencakup pengetahuan teknis kepemiluan, keterampilan manajerial, serta sikap dan motivasi yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Fauzi (2019) dalam penelitiannya pada Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan kontribusi sebesar 60,4%. Sejauh mana temuan ini berlaku dalam konteks penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi merupakan pertanyaan yang relevan untuk dijawab.

Di sisi lain, pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pilkada semakin krusial, khususnya dalam konteks pandemi yang menuntut minimalisasi kontak fisik dan kerumunan massa. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan PKPU No. 13 Tahun 2020 yang mengamanatkan pemanfaatan *platform* digital dan media *daring* dalam tahapan kampanye dan debat publik. Penerapan teknologi informasi dalam pemilu, sebagaimana dikaji oleh Tolbert & McNeal (2003), terbukti dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih melalui kemudahan akses informasi. Boulianne (2015, 2020) dalam meta-analisis komprehensifnya atas dua dekade penelitian media digital juga mengkonfirmasi bahwa penggunaan media digital berpengaruh positif pada partisipasi politik warga negara.

Meskipun hubungan antara kompetensi aparatur, sistem informasi, dan partisipasi politik masyarakat tampak logis secara teoritis, belum banyak penelitian empiris yang secara khusus mengkaji dinamika hubungan ini dalam konteks penyelenggaraan Pilkada di era pandemi COVID-19, terutama di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Irawan & Adham (2019) meneliti partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga dalam Pilkada Tasikmalaya, namun tidak menyentuh aspek kompetensi aparatur dan sistem informasi. Sari et al. (2020) mengkaji partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Bombana, tetapi lebih berfokus pada faktor penghambat sosiologis. Rochmah & Handika (2015) meneliti sistem informasi berbasis SMS *gateway* untuk Pilkada, namun tidak mengkaitkannya dengan tingkat partisipasi. Sementara itu, Cahyaningsih et al. (2019) menganalisis penetrasi teknologi informasi dalam Pilkada Serentak 2018, tetapi pada konteks sebelum pandemi.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi mencakup: (1) belum adanya kajian yang secara simultan menguji pengaruh kompetensi aparatur DAN sistem informasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam satu model analisis terintegrasi; (2) konteks pandemi COVID-19 yang menciptakan dinamika unik dalam penyelenggaraan Pilkada; (3) lokus penelitian spesifik di Kabupaten Karawang yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah industri dengan kompleksitas demografis dan epidemiologis yang tinggi. Berdasarkan

kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang; dan (2) menganalisis pengaruh Sistem Informasi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan model baru serta kontribusi praktis bagi penyelenggara Pilkada dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Indonesia (Koc-Michalska et al., 2016; Saglie & Vabo, 2009).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kompetensi Aparatur

Teori kompetensi yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Spencer & Spencer (1993) yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar individu yang berhubungan secara kausal dengan kriteria kinerja yang efektif dan/atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. McClelland (1973) merupakan pelopor konsep kompetensi dalam konteks sumber daya manusia, yang menyatakan bahwa kemampuan individu yang sesungguhnya tidak dapat diukur hanya dari tes kecerdasan konvensional, melainkan dari kompetensi yang mencakup motif, sifat kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Boyatzis (1982) kemudian mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kapasitas yang ada pada seseorang yang memungkinkannya memenuhi persyaratan pekerjaan dalam suatu organisasi.

Spencer & Spencer (1993) mengidentifikasi lima dimensi utama kompetensi, yaitu: (1) *Motives*, yaitu hal-hal yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan seseorang yang menyebabkan tindakan; (2) *Traits*, yaitu karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap situasi; (3) *Self-Concept*, yaitu sikap, nilai, atau citra diri seseorang; (4) *Knowledge*, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang konten tertentu; dan (5) *Skills*, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu. Model kompetensi ini telah banyak diterapkan dalam berbagai konteks organisasi (Le Deist & Winterton, 2005). Woodruffe (1993) memperjelas bahwa kompetensi bukan sekadar kepandaian teknis, melainkan mencakup dimensi perilaku yang lebih luas. Dalam konteks aparatur penyelenggara pemilu, kompetensi mencakup kemampuan teknis kepemiluan, integritas moral, kemampuan komunikasi dengan masyarakat, serta keterampilan adaptif menghadapi situasi darurat seperti pandemi (Moehariono, 2012; Hutapea & Thoha, 2008).

Goodman & Stokes (2020) dalam studi tentang pekerja tempat pemungutan suara (*poll workers*) selama COVID-19 menemukan bahwa kompetensi petugas pemilu, terutama kemampuan adaptasi terhadap protokol kesehatan baru, secara signifikan memengaruhi kepercayaan pemilih dan keputusan untuk berpartisipasi. Merivaki & Smith (2020) juga mengkonfirmasi bahwa administrasi pemilu yang berkualitas, yang ditentukan oleh kompetensi aparaturannya, memiliki hubungan positif dengan tingkat partisipasi pemilih. Temuan-temuan ini menguatkan relevansi teori kompetensi Spencer & Spencer (1993) dalam konteks penelitian pengaruh kompetensi aparatur terhadap partisipasi politik masyarakat.

Teori Sistem Informasi

Landasan teori sistem informasi dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Indrajit (2004) yang menjelaskan bahwa aset terpenting dalam sistem informasi organisasi mencakup tiga aspek yang dikenal sebagai *The Three I/T Assets*, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, yang mencakup kompetensi, kinerja, kerjasama, dan tanggung jawab staf pengelola sistem informasi; (2) Teknologi, yang mencakup infrastruktur perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang terintegrasi; dan (3) Relasi, yang mencakup hubungan antara fungsi sistem informasi dengan pengambilan keputusan dan pemangku kepentingan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Laudon & Laudon (2020), yang mendefinisikan sistem informasi sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan kendali organisasi.

Dalam perspektif teknologi informasi untuk pemerintahan dan demokrasi, Grönlund & Horan (2005) mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses demokrasi yang dikenal sebagai *e-democracy* dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan partisipasi publik secara signifikan. O'Brien & Marakas (2010) menjelaskan bahwa sistem informasi yang efektif mampu mengurangi asimetri informasi antara penyelenggara dan masyarakat, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Turban et al. (2008) lebih lanjut menyatakan bahwa investasi pada kualitas sistem informasi (termasuk keandalan teknologi, kompetensi SDM pengelola, dan integrasi relasi antar pemangku kepentingan) memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan pengguna. Dalam konteks Pilkada, pengguna utama sistem informasi adalah masyarakat pemilih yang membutuhkan informasi akurat dan mudah diakses tentang calon, jadwal, dan prosedur pemilihan (Alvarez & Hall, 2008; Mossberger et al., 2008).

McLeod & Schell (2007) menegaskan bahwa kualitas sistem informasi ditentukan oleh tiga elemen kunci: kualitas data (*data quality*), kualitas sistem (*system quality*), dan kualitas

layanan (*service quality*). Dalam penyelenggaraan Pilkada era pandemi, kualitas sistem informasi menjadi sangat kritis karena penyebaran informasi melalui platform digital menjadi jalur utama komunikasi antara penyelenggara dan pemilih, mengingat terbatasnya pertemuan tatap muka akibat protokol kesehatan. Tolbert & McNeal (2003) secara empiris membuktikan bahwa ketersediaan dan kualitas informasi pemilu online berpengaruh positif terhadap pengetahuan pemilih dan keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Temuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks Pilkada Karawang 2020 di mana platform digital menjadi instrumen utama kampanye sesuai amanat PKPU No. 13 Tahun 2020.

Teori Partisipasi Politik Masyarakat

Teori partisipasi politik yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Hendrik (2010), yang mengidentifikasi tujuh faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada: (1) Status sosial dan ekonomi, (2) Situasi, (3) Afiliasi politik orang tua, (4) Pengalaman berorganisasi, (5) Kesadaran politik, (6) Kepercayaan kepada pemerintah, dan (7) Perangsang partisipasi melalui sosialisasi dan diskusi. Teori ini dibangun di atas fondasi konseptual yang dikembangkan oleh para pemikir demokrasi terdahulu. Huntington & Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga yang mencoba memengaruhi kebijakan pemerintah dan keputusan politik. Milbrath & Goel (1977) mengelaborasi lebih jauh dengan mengidentifikasi empat faktor utama pendorong partisipasi: stimulus politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan keadaan politik.

Norris (2002) dalam kajian komparatifnya tentang aktivisme politik lintas negara menemukan bahwa partisipasi politik tidak semata-mata ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi individual, tetapi sangat dipengaruhi oleh karakteristik institusional sistem pemilu dan kualitas administrasi pemilihan. Dahl (1971) dalam teori poliarki-nya menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna membutuhkan tidak hanya kebebasan formal untuk berpartisipasi, tetapi juga kondisi substantif yang memungkinkan partisipasi tersebut, termasuk akses terhadap informasi yang memadai. Pateman (1970) menekankan pentingnya *participatory democracy* yang menuntut tidak hanya partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi keterlibatan aktif warga dalam seluruh proses politik. Dalam konteks Pilkada, Boulianne (2020) dalam meta-analisis terbarunya atas 186 studi mengkonfirmasi bahwa penggunaan media sosial dan platform digital memiliki efek positif moderat terhadap partisipasi politik, memperkuat relevansi variabel sistem informasi dalam memprediksi tingkat partisipasi.

Christensen & Bengtsson (2011) menemukan bahwa kompetensi politik online (*political online competence*) menjadi faktor mediasi penting dalam hubungan antara penggunaan internet dan partisipasi politik. Hal ini mengimplikasikan bahwa efektivitas sistem informasi

dalam mendorong partisipasi politik sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi digital tersebut. Cantijoch & Gibson (2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa partisipasi politik online bukan merupakan pengganti melainkan pelengkap partisipasi konvensional, termasuk pemberian suara. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi strategi penyelenggara Pilkada dalam merancang sistem informasi yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberdayakan pemilih secara digital. Saglie & Vabo (2009) dalam studi tentang *e-democracy* di tingkat pemerintahan lokal Norwegia membuktikan bahwa partisipasi online lebih tinggi pada daerah yang memiliki sistem informasi pemerintahan yang lebih berkembang, menegaskan hubungan positif antara kualitas sistem informasi dan partisipasi warga.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Pertama, Kompetensi Aparatur (yang diukur melalui dimensi *motives, traits, self-concept, knowledge, dan skills*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Kedua, Sistem Informasi (yang diukur melalui dimensi sumber daya manusia, teknologi, dan relasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Kedua hipotesis ini diuji secara simultan melalui model persamaan struktural (Structural Equation Model/SEM), dengan partisipasi politik masyarakat sebagai variabel laten endogen yang diukur melalui tujuh dimensi: status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalaman organisasi, kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, dan perangsang partisipasi (Elklit & Reynolds, 2005; Norris, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara sekuensial eksplanatoris (Creswell & Plano Clark, 2018). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menguji hipotesis tentang pengaruh antar variabel, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam dan menginterpretasikan temuan kuantitatif. Pilihan desain ini sejalan dengan rekomendasi Tashakkori & Teddlie (2010) yang menyatakan bahwa metode campuran memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial-politik yang kompleks dibandingkan dengan penggunaan salah satu metode secara tunggal. Sugiyono (2019) juga menegaskan bahwa kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dapat saling melengkapi dan memperkuat validitas temuan penelitian.

Populasi penelitian mencakup seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karawang era pandemi COVID-19, yang terdiri dari: (1) komisioner dan pegawai KPUD Karawang (27 orang); (2) komisioner dan pegawai Bawaslu Karawang (18 orang); (3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (30 orang); (4) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Klari (13 orang); dan (5) pemilih di Kecamatan Klari (125.496 jiwa), dengan total populasi 125.584 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Random Sampling dengan formula Slovin pada tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan 5%, menghasilkan sampel teoritis 399 responden yang kemudian didistribusikan secara proporsional ke seluruh unit analisis (Sekaran & Bougie, 2016; Neuman, 2014). Dari penyebaran kuesioner, diperoleh 263 responden yang data kuesionernya lengkap dan valid untuk dianalisis.

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan operasionalisasi ketiga variabel laten: (1) Variabel Kompetensi Aparatur (X1) diukur dengan 15 item yang mengacu pada lima dimensi Spencer & Spencer (1993): *motives, traits, self-concept, knowledge, dan skills*; (2) Variabel Sistem Informasi (X2) diukur dengan 12 item yang mengacu pada tiga dimensi Indrajit (2004): sumber daya manusia, teknologi, dan relasi; (3) Variabel Partisipasi Politik Masyarakat (Y) diukur dengan 21 item yang mengacu pada tujuh faktor Hendrik (2010): status sosial-ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalaman organisasi, kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, dan perangsang partisipasi. Semua item menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Baik sampai 5 = Sangat Baik). Instrumen penelitian telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam pengumpulan data lapangan.

Analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan program LISREL 8.8 melalui pendekatan dua tahap (*two-step approach*): tahap pertama *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk menguji validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan tahap kedua *Second Order CFA* untuk menguji model struktural dan hipotesis (Wijanto, 2008; Hair et al., 2019). Pemilihan SEM sebagai metode analisis didasarkan pada kemampuannya untuk secara simultan menguji hubungan antara variabel laten, mengakomodasi kesalahan pengukuran, dan menghasilkan pengujian kecocokan model yang komprehensif (Kline, 2015; Ghozali, 2008). Metode estimasi yang digunakan adalah Maximum Likelihood (ML) yang mengasumsikan distribusi normal multivariat, dinilai tepat berdasarkan karakteristik data (Bachrudin & Tobing, 2003). Kecocokan model diuji menggunakan 17 indeks *Goodness of Fit* (GOF) yang mencakup *Absolute Fit Measures, Incremental Fit Measures, dan Parsimonious Fit Measures*. Adapun analisis data kualitatif

dilakukan menggunakan metode Triangulasi Pengamat dengan menggabungkan perspektif dari penyelenggara Pilkada, pengawas pemilu, dan masyarakat pemilih.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 263 responden yang terdistribusi di berbagai unit analisis penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karawang 2020. Berdasarkan aspek kelompok umur, responden didominasi oleh kelompok berusia di bawah 30 tahun (43%), disusul kelompok 30-40 tahun (26%), di atas 50 tahun (16%), dan kelompok 41-50 tahun (15%). Distribusi usia ini mencerminkan bahwa mayoritas responden merupakan pemilih muda atau pemilih pemula yang lebih familiar dengan teknologi digital, sebuah karakteristik yang relevan dalam mengkaji efektivitas sistem informasi terhadap partisipasi politik (Boulianne, 2020; Cantijoch & Gibson, 2021).

Tabel 1. Profil Responden Penelitian

No	Aspek	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Kelompok Umur	Di bawah 30 tahun	113	43%
		30–40 tahun	68	26%
		41–50 tahun	39	15%
		Di atas 50 tahun	43	16%
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	166	63%
		Perempuan	97	37%
3	Pendidikan	SMA/Sederajat	95	36%
		Sarjana (S1)	126	48%
		Magister (S2)	34	13%
		Doktor (S3) / SD	8	3%
4	Jabatan/Fungsional	Pemilih	224	85%
		Petugas	24	9%
		Ketua/Kepala	15	6%
5	Instansi	KPUD	5	2%
		Bawaslu Daerah	8	3%
		PPK	3	1%
		PPS	29	11%
		Lainnya (Masyarakat)	218	83%

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian, 2021

Dari sisi jenis kelamin, responden laki-laki lebih dominan (63%) dibanding perempuan (37%). Secara akademis, responden terdidik mendominasi dengan 48% berpendidikan sarjana (S1) dan 13% pascasarjana (S2/S3), sementara 36% berpendidikan SMA/ sederajat. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini mengindikasikan potensi yang besar bagi pemanfaatan sistem informasi digital dalam proses Pilkada, mengingat Mossberger et al. (2008) menemukan bahwa pendidikan merupakan salah satu prediktor terkuat bagi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Dari sisi keterlibatan dalam penyelenggaraan Pilkada, 85% responden berstatus sebagai pemilih umum, 11% sebagai petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara), 6% sebagai ketua/kepala lembaga, dan sisanya merupakan staf KPUD dan Bawaslu. Profil responden ini memastikan bahwa data penelitian mencerminkan perspektif yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem Pilkada, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan representatif.

Hasil Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Pengujian kecocokan keseluruhan model (*Goodness of Fit/GOF*) menggunakan 17 indeks dari tiga kategori pengukuran menghasilkan temuan bahwa model penelitian dapat dikategorikan *Good Fit*. Dalam kategori *Absolute Fit Measures*, 6 dari 7 indeks menunjukkan kecocokan baik (*fit*), termasuk P-Value ($0,000 < 0,05$), RMSR ($0,025 < 0,05$), dan RMSEA (0,11 dalam rentang 0,10–0,13). Kategori *Incremental Fit Measures* menunjukkan hasil yang sangat baik di mana seluruh 5 indeks memenuhi kriteria: NFI = 0,96 ($>0,95$), NNFI = 0,96 ($>0,90$), IFI = 0,97 ($>0,90$), RFI = 0,95 ($>0,90$), dan CFI = 0,97 ($>0,95$). Sementara kategori *Parsimonious Fit Measures* menunjukkan 2 indeks *fit* dan 3 indeks *marginal fit*, namun secara keseluruhan model tetap memenuhi standar kecocokan yang ditetapkan oleh Hair et al. (2019). Dalam SEM, tidak semua indeks GOF harus menunjukkan nilai *fit* secara bersamaan; yang penting adalah keseimbangan hasil di seluruh kategori (Wijanto, 2008; Kline, 2015).

Tabel 2. Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model (*Goodness of Fit*)

No	Jenis Ukuran GoF	Target Kecocokan	Hasil Estimasi	Tingkat Kecocokan
1	Chi-Square Statistic	Diharapkan kecil	351,51	Fit
2	P-Value	$< 0,05$	0,000	Fit
3	GFI	$> 0,90$	0,84	Marginal Fit
4	RMSR	$< 0,05$	0,025	Fit
5	RMSEA	$\leq 0,08$	0,11	Fit
6	NFI	$> 0,95$	0,96	Fit

7	NNFI	> 0,90	0,96	Fit
8	CFI	> 0,95	0,97	Fit
9	IFI	> 0,90	0,97	Fit
10	RFI	> 0,90	0,95	Fit
11	AGFI	> 0,90	0,77	Marginal Fit
12	PGFI	> 0,60	0,60	Fit
13	PNFI	0,60–0,90	0,78	Fit

Sumber: Output LISREL hasil olahan peneliti, 2021

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* menunjukkan bahwa seluruh indikator pada ketiga variabel laten dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai *loading factor* masing-masing dimensi yang lebih besar dari batas minimum 0,50 yang dipersyaratkan (Hair et al., 2019), serta nilai *T-value* yang lebih besar dari 1,96. Untuk variabel Kompetensi Aparatur (X1), nilai *loading factor* berkisar antara 0,77 (*Motives dan Self-Concept*) hingga 0,87 (*Skills*). Untuk variabel Sistem Informasi (X2), nilai *loading factor* berkisar antara 0,77 (Relasi) hingga 0,79 (SDM). Untuk variabel Partisipasi Politik Masyarakat (Y), nilai *loading factor* berkisar antara 0,62 (Status Sosial Ekonomi) hingga 0,86 (Pengalaman Organisasi). Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *Construct Reliability (CR)* dan *Variance Extracted (VE)* yang memenuhi standar minimum, dengan $CR \geq 0,70$ dan $VE \geq 0,40$ untuk ketiga variabel laten (Bachrudin & Tobing, 2003; Ghozali, 2008).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Laten

No	Variabel / Dimensi	Loading Factor	T-Value	Validitas	CR	VE	Reliabilitas
1	Kompetensi Aparatur (X1)				0,76	0,53	Baik
	a. Motives	0,77	14,50	Valid			
	b. Traits	0,79	15,04	Valid			
	c. Self-Concept	0,77	14,55	Valid			
	d. Knowledge	0,79	15,01	Valid			
	e. Skills	0,87	17,50	Valid			
2	Sistem Informasi (X2)				0,73	0,45	Baik
	a. Sumber Daya Manusia	0,79	14,92	Valid			

	b. Teknologi	0,78	14,48	Valid			
	c. Relasi	0,77	14,42	Valid			
3	Partisipasi Politik Masyarakat (Y)				0,94	0,64	Baik
	a. Status Sosial & Ekonomi	0,62	10,00	Valid			
	b. Situasi	0,78	10,36	Valid			
	c. Afiliasi Politik Orang Tua	0,75	10,11	Valid			
	d. Pengalaman Organisasi	0,86	11,13	Valid			
	e. Kesadaran Politik	0,77	10,24	Valid			
	f. Kepercayaan kepada Pemerintah	0,82	10,74	Valid			
	g. Perangsang Partisipasi	0,77	10,24	Valid			

Sumber: Output LISREL hasil olahan peneliti, 2021.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Model Struktural

Pengujian model struktural dan hipotesis penelitian dilakukan secara simultan menggunakan program LISREL 8.8 dengan metode estimasi *Maximum Likelihood*. Hasil pengujian menghasilkan koefisien determinan (*R-Square*) sebesar 0,76 atau 76%, yang berarti bahwa secara bersama-sama Kompetensi Aparatur dan Sistem Informasi memberikan kontribusi sebesar 76% terhadap variasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini, seperti budaya politik lokal, pengaruh tokoh masyarakat, dan faktor demografis lainnya. Nilai *R-Square* ini tergolong tinggi dalam penelitian sosial-politik, menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya prediksi yang kuat (Norris, 2014; Kline, 2015).

Tabel 4. Estimasi Koefisien Jalur dan Signifikansi Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Jalur	T-Value	Cut-off (1,96)	Keputusan	R-Square
-----------	-----------------	---------	----------------	-----------	----------

H1: Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1) Terhadap Partisipasi Politik (Y)	0,24	1,01	1,96	DITOLAK (Tidak Signifikan)	0,76
H2: Pengaruh Sistem Informasi (X2) Terhadap Partisipasi Politik (Y)	0,67	2,78	1,96	DITERIMA (Signifikan)	0,76

Sumber: Output LISREL hasil olahan peneliti, 2021

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian dua hipotesis penelitian. Untuk Hipotesis Pertama (H1), diperoleh nilai *T-value* sebesar 1,01 yang lebih kecil dari nilai *cut-off* yang dipersyaratkan (1,96) pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, H1 ditolak, yang berarti Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Meskipun koefisien jalurnya positif (0,24), pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Temuan ini bertentangan dengan ekspektasi teoritis awal, namun dapat dijelaskan melalui beberapa argumen substantif yang akan dibahas lebih lanjut.

Untuk Hipotesis Kedua (H2), diperoleh nilai *T-value* sebesar 2,78 yang lebih besar dari nilai *cut-off* 1,96. Dengan demikian, H2 diterima, yang berarti Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Koefisien jalur sebesar 0,67 mengindikasikan pengaruh yang substansial dan bermakna. Setiap peningkatan pada kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan Pilkada secara stimulan diikuti dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Tolbert & McNeal (2003), Boulianne (2015, 2020), dan Goodman (2020) yang semuanya mengkonfirmasi peran signifikan teknologi informasi dalam mendorong partisipasi politik dan pemilih di era digital.

Analisis Kompetensi Aparatur dan Partisipasi Politik

Temuan bahwa Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (*T-value* = 1,01) merupakan temuan yang mengundang refleksi mendalam. Dari perspektif teoritis, Spencer & Spencer (1993) dan Boyatzis (1982) memang menegaskan bahwa kompetensi aparatur secara langsung memengaruhi kinerja organisasi, termasuk penyelenggara Pilkada. Namun, hubungan antara kinerja penyelenggara dan keputusan pemilih

untuk berpartisipasi tampaknya tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh faktor-faktor lain, terutama faktor kepercayaan dan persepsi terhadap integritas proses pemilu.

Merivaki & Smith (2020) dalam studi komprehensif tentang administrasi pemilu selama COVID-19 di Amerika Serikat menemukan bahwa pengaruh kompetensi pekerja pemilu terhadap partisipasi pemilih bersifat kontekstual dan dimediasi oleh variabel kepercayaan institusional. Mereka menyimpulkan bahwa kompetensi petugas pemilu tidak secara otomatis mendorong partisipasi apabila masyarakat sudah memiliki keputusan apriori tentang keselamatan diri di tengah pandemi. Dalam konteks Pilkada Karawang 2020, faktor ancaman kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang sangat nyata (504 kematian terkonfirmasi hingga Maret 2021) kemungkinan besar menjadi faktor penghalang (*inhibiting factor*) yang lebih dominan dalam menentukan keputusan pemilih, sehingga mengeliminasi dampak kompetensi aparatur (Goodman & Stokes, 2020).

Analisis *loading factor* pada dimensi-dimensi Kompetensi Aparatur menunjukkan bahwa dimensi *Skills* memiliki bobot tertinggi (0,87), diikuti *Traits* (0,79), *Knowledge* (0,79), *Motives* (0,77), dan *Self-Concept* (0,77). Fakta bahwa dimensi *Skills* paling dominan mengimplikasikan bahwa dari perspektif masyarakat, keterampilan operasional petugas pemilu (keterampilan melaksanakan, menilai, dan melaporkan) merupakan aspek yang paling diperhatikan. Namun demikian, Christensen & Bengtsson (2011) mengingatkan bahwa persepsi masyarakat tentang kompetensi petugas tidak selalu berkorelasi langsung dengan keputusan untuk berpartisipasi, karena partisipasi ditentukan oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Norris et al. (2020) dalam laporan tentang integritas pemilu AS 2020 juga mencatat bahwa meskipun kompetensi administrasi pemilu meningkat, keputusan pemilih untuk berpartisipasi lebih banyak dipengaruhi oleh identitas partisan, isu-isu kebijakan, dan kondisi pandemi daripada kualitas teknis penyelenggara.

Grömping (2022) dalam kajian tentang pemilu Korea Selatan 2020 yang berlangsung di masa pandemi memberikan perspektif yang menarik: keberhasilan Korea Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih sebesar 8,1% tidak semata-mata karena kompetensi teknis aparatur pemilu, melainkan karena kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang dibangun selama bertahun-tahun dan dukungan sistem informasi yang transparan dan real-time. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur mungkin lebih berdampak tidak langsung pada partisipasi, yakni melalui jalur pembangunan kepercayaan institusional dalam jangka panjang, bukan melalui pengaruh langsung dalam konteks pemilu tunggal. Yeo (2021) juga mengkonfirmasi bahwa dalam pemilu-pemilu Asia

Tenggara selama COVID-19, kompetensi aparatur cenderung berpengaruh lebih kuat pada kualitas proses dibandingkan pada keputusan pemilih untuk hadir ke TPS.

Meskipun tidak signifikan secara langsung, fakta bahwa koefisien jalur Kompetensi Aparatur bernilai positif (0,24) tetap mengandung makna substantif. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual dan empiris, peningkatan kompetensi aparatur tetap berkontribusi positif terhadap partisipasi politik, meskipun besarnya tidak cukup untuk melampaui ambang signifikansi statistik dalam konteks penelitian ini. Fauzi (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dengan kontribusi 60,4%, namun konteks penelitian tersebut adalah kinerja birokrasi, bukan keputusan pemilih. Perbedaan konteks ini menjelaskan divergensi temuan yang ada. Ke depan, peningkatan kompetensi aparatur pemilu tetap perlu diprioritaskan, namun harus disertai dengan strategi komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar kompetensi tersebut dapat dirasakan manfaatnya dan mendorong kepercayaan publik (Le Deist & Winterton, 2005; Woodruffe, 1993).

Analisis Sistem Informasi dan Partisipasi Politik

Berbeda dengan Hipotesis Pertama, Hipotesis Kedua tentang pengaruh Sistem Informasi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat berhasil dikonfirmasi dengan nilai $T\text{-value} = 2,78$ dan koefisien jalur = 0,67. Temuan ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang sangat penting dalam konteks pemilu di era pandemi dan era digital. Dari perspektif teoritis, temuan ini mengkonfirmasi dan memperkuat argumen Tolbert & McNeal (2003) yang menyatakan bahwa ketersediaan informasi pemilu yang berkualitas melalui platform digital secara signifikan meningkatkan pengetahuan pemilih dan keputusan untuk berpartisipasi. Boulianne (2015) dalam meta-analisis atas 38 studi juga menemukan hubungan positif konsisten antara penggunaan media sosial dan berbagai bentuk partisipasi politik, termasuk pemberian suara.

Analisis *loading factor* pada dimensi-dimensi Sistem Informasi menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki bobot tertinggi (0,79), disusul Teknologi (0,78), dan Relasi (0,77). Dominannya dimensi SDM sistem informasi mengindikasikan bahwa dari perspektif masyarakat, faktor manusia yakni kompetensi, kinerja, kerjasama, dan tanggung jawab staf pengelola sistem informasi, menjadi penentu utama efektivitas sistem informasi dalam mendorong partisipasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan O'Brien & Marakas (2010) yang menyatakan bahwa teknologi informasi hanya akan efektif apabila dioperasikan oleh SDM yang kompeten dan berorientasi pada pelayanan. Koc-Michalska et al. (2016) dalam studi lintas negara tentang partisipasi digital menemukan bahwa kualitas SDM pengelola

platform digital pemerintah merupakan faktor mediasi kritis antara ketersediaan teknologi dan penggunaannya oleh masyarakat.

Aspek Teknologi sistem informasi juga memainkan peran penting (*loading factor* 0,78) dalam mendorong partisipasi. Ini mencakup keandalan perangkat keras, keandalan perangkat lunak, integrasi sistem, dan efektivitas penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Grönlund & Horan (2005) menegaskan bahwa infrastruktur teknologi yang handal dan terintegrasi merupakan prasyarat bagi *e-democracy* yang efektif. Dalam konteks Pilkada Karawang 2020, platform digital yang digunakan mencakup sistem informasi data pemilih (SIDALIH), sistem penghitungan suara (SITUNG), media sosial KPU, dan website resmi yang menyediakan informasi tentang calon, jadwal, dan prosedur pemilihan. Cahyaningsih et al. (2019) menemukan bahwa SIDALIH telah mencapai level *enabler* dalam penetrasi teknologi informasi Pilkada, yang berarti sudah mampu memfasilitasi proses pemilihan secara substansial. Turban et al. (2008) menekankan bahwa investasi pada keandalan teknologi berbanding lurus dengan kepuasan pengguna dan kecenderungan untuk memanfaatkan layanan berbasis teknologi tersebut.

Dimensi Relasi sistem informasi (*loading factor* 0,77) mencerminkan kualitas hubungan fungsional antara sistem informasi dengan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi dengan pihak-pihak lain. McLeod & Schell (2007) menjelaskan bahwa dimensi relasi ini sesungguhnya mengukur seberapa jauh sistem informasi mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pemilu. Saglie & Vabo (2009) dalam studi *e-democracy* di Norwegia menemukan bahwa integrasi platform informasi antara penyelenggara pemilu, media, partai politik, dan pemilih secara signifikan meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi. Konteks pandemi memperkuat urgensi dimensi relasi ini, karena keterbatasan interaksi fisik menyebabkan informasi yang mengalir melalui jaringan digital menjadi lebih kritis dalam membentuk persepsi dan motivasi pemilih (James & Alihodzic, 2020; Beaulieu, 2014).

Dari perspektif dimensi Partisipasi Politik Masyarakat sebagai variabel endogen, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Pengalaman Organisasi memiliki *loading factor* tertinggi (0,86), disusul Kepercayaan kepada Pemerintah (0,82), Situasi (0,78), Kesadaran Politik (0,77), Perangsang Partisipasi (0,77), Afiliasi Politik Orang Tua (0,75), dan Status Sosial-Ekonomi (0,62). Dominannya Pengalaman Organisasi mengkonfirmasi pandangan Putnam (2000) tentang pentingnya modal sosial dan pengalaman kolektif dalam mendorong partisipasi sipil. Individu yang memiliki pengalaman dalam organisasi, baik formal maupun informal, cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dan lebih termotivasi untuk

berpartisipasi dalam proses demokrasi. Norris (2002) dan Dahl (1971) juga menegaskan bahwa pengalaman organisasi merupakan sekolah demokrasi (*school of democracy*) yang membentuk kompetensi warga untuk berpartisipasi secara efektif.

Temuan Penelitian: *Skills Democracy Model*

Berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap dimensi-dimensi paling dominan dari ketiga variabel penelitian, penelitian ini mengajukan model baru yang disebut *Skills Democracy Model*. Model ini merupakan rekonstruksi konseptual yang lahir dari dekonsentrasi analisis kausalitas antar dimensi, yang menunjukkan bahwa dalam konteks Pilkada era pandemi COVID-19, peningkatan partisipasi politik masyarakat paling efektif didorong melalui dua jalur utama: (1) Sumber Daya Manusia Sistem Informasi yang kompeten dan profesional; dan (2) Pengalaman Organisasi warga yang luas dan beragam. Kedua jalur ini berinteraksi dan bersinergi untuk membentuk apa yang disebut sebagai Demokrasi Terampil (*Skills Democracy*), di mana warga dan penyelenggara sama-sama memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses demokrasi secara efektif dan efisien, bahkan dalam kondisi darurat seperti pandemi.

Tabel 5. Rekapitulasi Dimensi Paling Dominan (*Skills Democracy Model*)

No	Variabel	Dimensi Paling Dominan	Loading Factor
1	Kompetensi Aparatur (X1)	<i>Skills</i> (Keterampilan)	0,87
2	Sistem Informasi (X2)	Sumber Daya Manusia	0,79
3	Partisipasi Politik Masyarakat (Y)	Pengalaman Organisasi	0,86

Sumber: Output LISREL hasil olahan peneliti, 2021

Skills Democracy Model ini memiliki tiga dimensi operasional yang saling terkait: (1) Keterampilan Pelaksanaan, mencakup kemampuan teknis dan prosedural dalam menjalankan tahapan Pilkada sesuai regulasi, termasuk penerapan protokol kesehatan COVID-19; (2) Keterampilan Menilai, mencakup kemampuan untuk mengevaluasi kualitas proses dan hasil pemilihan secara objektif dan transparan; dan (3) Keterampilan Melaporkan, mencakup kemampuan untuk mendokumentasikan dan mengomunikasikan hasil pemilihan kepada publik secara cepat, akurat, dan akuntabel. Model ini tidak hanya relevan untuk penyelenggara Pilkada, tetapi juga bagi masyarakat pemilih yang membutuhkan keterampilan digital untuk mengakses, menginterpretasikan, dan merespons informasi Pilkada secara cerdas (Mossberger et al., 2008; Alvarez & Hall, 2008). Cantijoch & Gibson (2021) menegaskan bahwa di era demokrasi digital, keterampilan sebagai warga digital (*digital citizenship skills*) merupakan

komponen esensial partisipasi politik yang efektif. *Skills Democracy Model* mengintegrasikan perspektif ini dengan kondisi kontekstual pandemi COVID-19 yang memaksa akselerasi digitalisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk demokrasi elektoral.

Secara komparatif internasional, *Skills Democracy Model* memiliki resonansi dengan temuan-temuan penelitian di berbagai konteks. Grömping (2022) dalam analisis Pilkada Korea Selatan 2020 mengidentifikasi bahwa kesuksesan Korea bukan hanya karena teknologi canggih, tetapi karena masyarakat yang terampil secara digital dan lembaga pemilu yang memiliki SDM berkualitas yang persis mencerminkan dua pilar utama *Skills Democracy Model*. Goodman (2020) dalam kajian tentang pemilu-pemilu di era pandemi juga menyimpulkan bahwa lompatan kualitas partisipasi terjadi di negara-negara yang berhasil mengombinasikan keterampilan organisasional penyelenggara dengan keterampilan digital masyarakat. Norris et al. (2020) dalam laporan tentang integritas pemilu global juga menegaskan bahwa era pandemi telah mempercepat transformasi digital pemilu yang menuntut level kompetensi baru baik dari penyelenggara maupun pemilih menjadi sebuah transisi yang tepat dikonseptualisasikan melalui *Skills Democracy Model*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil menguji secara empiris pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Informasi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil analisis SEM menggunakan LISREL 8.8 terhadap 263 responden, diperoleh dua kesimpulan utama. Pertama, Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat ($T\text{-value} = 1,01 < 1,96$; koefisien jalur = 0,24), sehingga Hipotesis Pertama ditolak. Meskipun arah pengaruhnya positif, besaran pengaruhnya tidak mencapai ambang signifikansi statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, kompetensi teknis aparatur pemilu tidak secara langsung mendorong keputusan pemilih untuk berpartisipasi, karena keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor risiko kesehatan, tingkat kepercayaan institusional jangka panjang, dan faktor-faktor sosial lain yang berada di luar cakupan kompetensi teknis aparatur.

Kedua, Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat ($T\text{-value} = 2,78 > 1,96$; koefisien jalur = 0,67), sehingga Hipotesis Kedua diterima. Koefisien determinan (*R-Square*) simultan kedua variabel sebesar 0,76 atau 76% mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki daya prediksi yang tinggi. Temuan ini

menegaskan bahwa dalam era pandemi yang memaksa minimalisasi interaksi fisik, kualitas sistem informasi yang mencakup kompetensi SDM pengelola, keandalan teknologi, dan kualitas relasi informasi menjadi faktor penentu utama dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Sistem informasi yang berkualitas mampu mengurangi hambatan akses informasi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan, dan memotivasi pemilih untuk tetap berpartisipasi meskipun dalam kondisi pandemi.

Penelitian ini juga menghasilkan temuan konseptual berupa *Skills Democracy Model*, yang mengajukan bahwa peningkatan kualitas demokrasi elektoral di era pandemi dan era digital perlu dibangun di atas dua pilar utama: (1) SDM Sistem Informasi yang kompeten dan profesional dari sisi penyelenggara, dan (2) Pengalaman Organisasi yang luas dari sisi masyarakat pemilih. Model ini memperluas perspektif teoritis tentang demokrasi partisipatif dengan menempatkan keterampilan digital (*Skills*) sebagai variabel mediasi kritis antara kelembagaan pemilu dan partisipasi warga.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Bagi penyelenggara Pilkada (KPUD dan KPU Pusat), prioritas investasi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sistem informasi, khususnya pengembangan SDM pengelola yang kompeten secara digital, pengintegrasian platform informasi pemilu yang handal dan *user-friendly*, serta pembangunan ekosistem relasi informasi yang transparan antara penyelenggara, media, partai politik, dan masyarakat. *Skills Democracy Model* perlu diadopsi sebagai kerangka strategis pengembangan kapasitas kelembagaan pemilu, dengan tiga dimensi operasional keterampilan (pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan) sebagai Kriteria Standar Kinerja (KSK). Bagi pemerintah daerah, peningkatan program literasi digital masyarakat perlu disinergikan dengan program pendidikan politik dan penguatan organisasi kemasyarakatan, guna membangun pengalaman organisasi yang mendorong partisipasi demokrasi yang berkualitas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji variabel-variabel mediasi dan moderasi yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti kepercayaan *politik* (*political trust*), literasi digital, dan identitas partisan, yang berpotensi menjelaskan mekanisme lebih mendalam dari hubungan antar variabel yang telah diidentifikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas dukungan kelembagaan, keuangan, dan fasilitasi penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, dan seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga dalam proses pengumpulan data. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian institusional IPDN tahun 2021.

DAFTAR REFERENSI

- Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2008). *Electronic elections: The perils and promises of digital democracy*. Princeton University Press.
- Bachrudin, A., & Tobing, H. L. (2003). Analisis data untuk penelitian survai dengan menggunakan LISREL 8. FMIPA UNPAD.
- Beaulieu, E. (2014). *Electoral protest and democracy in the developing world*. Cambridge University Press.
- Blais, A. (2006). What affects voter turnout? *Annual Review of Political Science*, 9, 111–125. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105121>
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>
- Boulianne, S. (2020). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. *Communication Research*, 47(7), 947–966. <https://doi.org/10.1177/0093650218808186>
- Boyatzis, R. E. (1982). *The competent manager: A model for effective performance*. John Wiley & Sons.
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi teknologi informasi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. *Jurnal Bawaslu*, 5(2), 1–25.
- Calenda, D., & Meijer, A. (2009). Young people, the internet and political participation. *Information, Communication & Society*, 12(6), 879–898. <https://doi.org/10.1080/13691180802158326>
- Cantijoch, M., & Gibson, R. (2021). Online political participation: The dimensions and correctives of a problem concept. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1837246>
- Christensen, H. S., & Bengtsson, Å. (2011). The political competence of internet participants. *Information, Communication & Society*, 14(6), 896–916. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2010.535823>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2020). *On democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/13510340500069204>
- Fauzi, A. (2019). Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 9(1), 1–15.
- Franklin, M. N. (2004). *Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2008). *Model persamaan struktural: Konsep dan aplikasi dengan program AMOS 16.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Goodman, N. (2020). Running elections during a pandemic. *Frontiers in Political Science*, 2, 591995. <https://doi.org/10.3389/fpos.2020.591995>
- Goodman, N., & Stokes, L. C. (2020). Reducing barriers to voting for people with disabilities: Evidence from the Canadian federal election. *Electoral Studies*, 64, 102127. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102127>
- Grömping, M. (2022). Pandemic elections: Comparative lessons from South Korea and beyond. *Electoral Studies*, 76, 102444. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102444>
- Grönlund, Å., & Horan, T. A. (2005). Introducing e-gov: History, definitions, and issues. *Communications of the Association for Information Systems*, 15, 713–729. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.01539>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hendrik. (2010). Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2), 139–155.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi plus: Teori, desain, kasus dan penerapan untuk HR dan organisasi yang dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrajit, R. E. (2004). *Kajian strategis cost benefit teknologi informasi*. Andi Offset.
- Irawan, A., & Adham, M. J. I. (2019). Partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 1(2), 94–108.
- James, T. S., & Alihodzic, S. (2020). When is it democratic to postpone an election? Elections during natural disasters, COVID-19, and emergency situations. *Election Law Journal*, 19(3), 344–362. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0642>
- Junaidi, V. (2009). Menata sistem penegakan hukum pemilu demokratis tinjauan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 201–230.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Koc-Michalska, K., Lilleker, D., Michalski, T., Gibson, R., & Zajac, J. M. (2016). Poland's 2011 online election campaign: New tools, new tricks, new media, old politics. *Journal of Information Technology & Politics*, 13(3), 209–225. <https://doi.org/10.1080/19331681.2016.1160436>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? *Human Resource Development International*, 8(1), 27–46. <https://doi.org/10.1080/1367886042000338227>
- Lijphart, A. (1997). Unequal participation: Democracy's unresolved dilemma. *American Political Science Review*, 91(1), 1–14. <https://doi.org/10.2307/2952255>
- McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. *American Psychologist*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/h0034092>
- McLeod, R., & Schell, G. P. (2007). *Management information systems* (10th ed.). Prentice Hall.
- Merivaki, T., & Smith, D. A. (2020). Poll workers, election administration, and the COVID-19 pandemic. *Election Law Journal*, 19(3), 380–395. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0671>

- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* (2nd ed.). Rand McNally.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi (edisi revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital citizenship: The internet, society, and participation*. MIT Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Norris, P., Garnett, H. A., & Gromping, M. (2020). The paranoid style of American elections: Explaining perceptions of electoral integrity in an age of populism. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 30(1), 105–125. <https://doi.org/10.1080/17457289.2019.1686454>
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management information systems* (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Prasetyoningsih, N. (2017). Dampak pemilihan umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241–256.
- Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*. LP2I Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rochmah, N., & Handika, A. (2015). Sistem informasi pemilihan kepala daerah dengan SMS gateway. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 10(2), 75–90.
- Saglie, J., & Vabo, S. I. (2009). Size and e-democracy: Online participation in Norwegian local politics. *Scandinavian Political Studies*, 32(4), 382–401. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2009.00238.x>
- Sari, U. I., Karsadi, & Idrus, M. (2020). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.36709/jppg.v5i1.10175>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 179–199.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)* (11th ed.). Alfabeta.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2003). Unraveling the effects of the internet on political participation? *Political Research Quarterly*, 56(2), 175–185. <https://doi.org/10.1177/106591290305600206>
- Turban, E., Leidner, D., McLean, E., & Wetherbe, J. (2008). *Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy* (6th ed.). John Wiley & Sons.

- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wijanto, S. H. (2008). *Structural equation model dengan LISREL 8.8: Konsep dan tutorial*. Graha Ilmu.
- Woodruffe, C. (1993). What is meant by a competency? *Leadership & Organization Development Journal*, 14(1), 29–36. <https://doi.org/10.1108/01437739310024692>
- Yeo, T. S. (2021). Election administration during COVID-19 in Southeast Asia: A comparative analysis. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(3), 299–315. <https://doi.org/10.1177/20578911211003773>